IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) MELALUI PROGRAM KAMPUS MENGAJAR PADA PRODI ADMINISTRASI PUBLIK DI SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Hermansyah¹, Siti Raudah², Barkatullah³

Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai E-mail: hermany656@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan program Kampus Mengajar adalah untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, khususnya di daerah yang membutuhkan, melalui partisipasi aktif mahasiswa. Terdapat beberapa permasalahan dalam Implementasi Penyelenggaraan Program Kampus Mengajar di STIA Amuntai yang sudah berjalan hampir 5 tahun ini, antara lain sebagai berikut: ketidaksesuaian bidang studi administrasi publik dengan kebutuhan pengajaran di sekolah; program di daerah terpencil terkendala oleh masalah infrastruktur seperti akses transportasi dan jaringan internet dan Belum maksimalnya evaluasi dari pihak kampus kepada mahasiswa setelah selesainya program Kampus Mengajar. Mengkaji bagaimana Implementasi Penyelenggaraan Program MBKM Melalui Program Kampus Mengajar pada Prodi Administrasi Publik di STIA Amuntai dan faktor-faktor mempengaruhinya yang menjadi tujuan utama penelitian ini. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Serta metode dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Dua belas informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling untuk menyediakan data. Kondensasi data dan menampilkan data, serta membuat kesimpulan dan memverifikasinya, merupakan bagian dari analisis data. Triangulasi, memeriksa atau menganalisis contoh-contoh negatif, menggunakan bahan referensi, melakukan member check, meningkatkan ketekunan, dan memperpanjang pengamatan adalah bagian dari uji kredibilitas. Implementasi Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Melalui Program Kampus Mengajar Pada Prodi Administrasi Publik di STIA Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang sudah baik yaitu: Pertama, transmisi. Kedua, sumber daya manusia atau petugas. Ketiga, komitmen. Keempat, dukungan. Kelima, wewenang. Keenam, koordinasi. Ketujuh, prosedur rekrutmen. Adapun indikator yang masih belum berjalan dengan baik yaitu: Pertama, konsistensi, Kedua, sasaran. Ketiga, fasilitas. Disamping itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Melalui Program Kampus Mengajar Pada Prodi Administrasi Publik di STIA Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi dua, yaitu: faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorongnya adalah Dukungan Penuh dari Pihak Kampus, Fleksibilitas Program MBKM, dan Kesempatan Mengasah Soft Skills. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Kebijakan Kemendikbudristek yang membolehkan semua jurusan untuk ikut Program Kampus Mengajar, dan Kebijakan Kemendikbudristek yang menempatkan penugasan ke tempat terpencil.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Kampus Mengajar

ABSTRACT

The objective of the Kampus Mengajar program is to make a tangible contribution to improving the quality of education in schools, particularly in underprivileged areas, through the active participation of students. Several challenges have arisen in implementing the Kampus Mengajar Program at STIA Amuntai, which has been running for almost five years. These include: the mismatch between the Public Administration field of study and teaching needs in schools; program implementation in remote areas facing infrastructure issues such as transportation and internet access; and the lack of optimal evaluation by the campus towards students after the completion of the program. This study aims to examine the implementation of the Kampus Mengajar Program under the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) framework in the Public

ISSN : 2685-8541 Vol. 6, No. 2, 2025

Administration program at STIA Amuntai and the factors that influence it. The research employs a descriptive-qualitative methodology, with data collected through documentation, interviews, and observation. Twelve informants were selected using a purposive sampling technique to provide data. Data analysis involves data condensation, data presentation, and drawing conclusions and verification. Credibility tests include triangulation, analyzing negative cases, using reference materials, member checks, enhancing perseverance, and extending observations. The implementation of the MBKM Kampus Mengajar Program in the Public Administration program at STIA Amuntai, Hulu Sungai Utara Regency, has been running effectively. This can be seen from well-performing indicators, namely: 1) transmission, 2) human resources or personnel, 3) commitment, 4) support, 5) authority, 6) coordination, and 7) recruitment procedures. However, there are indicators that have not been fully optimized: 1) consistency, 2) targets, and 3) facilities. In addition, the factors influencing the implementation of the MBKM Kampus Mengajar Program at STIA Amuntai are divided into two categories: driving factors and inhibiting factors. The driving factors include full support from the campus, the flexibility of the MBKM program, and opportunities to enhance soft skills. The inhibiting factors include the Ministry of Education and Culture's policy allowing all disciplines to participate in the Kampus Mengajar Program and the Ministry's policy assigning participants to remote areas.

Keyword: Implementation, Program, Teaching Campus

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). MBKM adalah kebijakan yang memberikan kesempatan mahasiswa untuk bisa belajar selama tiga semester diluar program studi yakni mengambil mata kuliah di luar program studi selama 1 semester dan berkegiatan di luar perguruan tinggi selama 2 semester.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Perguruan Tinggi merupakan upaya untuk menghasilkan SDM yang mampu menguasai kemampuan soft skill dan hard skill, serta berkepribadian dan leadership yang baik. Nadiem Makarim, mengatakan, "Seiring perubahan waktu di era revolusi industri 4.0 yang sangat erat dengan teknologi ini, dengan adanya program MBKM, akan memberikan kebebasan birokrasi dan otonomi bagi lembaga pendidikan dan dosen. Serta memberikan kebebasan kepada siswa dalam proses pembelajaran untuk memilih bidang yang mereka sukai (Makarim, 2021).

Dasar Hukum pelaksanaan kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Pendidikan Tinggi; Permendikbud Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum; Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri; Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Dalam buku panduan yang diterbitkan Kemendikbudristek mengenai panduan Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 8 Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi. Adapun yang masuk ke dalam 8 IKU 2 tersebut adalah: 1) Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak, 2) Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus, 3) Dosen Berkegiatan di Luar Kampus, 4) Praktisi Mengajar di Dalam Kampus, 5) Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat, 6) Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia, 7) Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif, 8) Program Studi Berstandar Internasional. Implementasi Program MBKM merupakan motor penggerak bagi perguruan tinggi untuk mencapai target IKU pada poin 2 yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus dalam rangka menyediakan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri, dunia usaha dan dunia kerja (Yulisna dkk., 2021) Jurnal Cerdas Proklamator.

ISSN : 2685-8541 Vol. 6, No. 2, 2025

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai adalah salah satu kampus swasta yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang aktif dan mendukung penuh mahasiswa-mahasiswa nya dalam mengikut Program MBKM terutama pada Program Kampus Mengajar. Terhitung mulai dari Kampus Mengajar Batch 3 yang berhasil diikuti oleh mahasiswa STIA Amuntai Prodi Administrasi Publik sebanyak 6 mahasiswa kemudian dilanjutkan dengan Batch 4 yang berhasil diikuti oleh 9 mahasiswa yang berlanjut sampai dengan sekarang dengan jumlah mahasiswa lolos setiap Batch nya semakin bertambah.

Berdasarkan observasi sementara dengan ditopang data yang ada, maka diketahui fenomena masalah yang ada pada Program Kampus Mengajar yang diikuti oleh mahasiswa STIA Amuntai adalah sebagai berikut: Ketidaksesuaian bidang studi mahasiswa dengan kebutuhan pengajaran di sekolah mitra juga menjadi masalah, misalnya mahasiswa dari jurusan administrasi publik diharapkan mengajar materi pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang akademik mereka, program di daerah terpencil terkendala oleh masalah infrastruktur seperti akses transportasi dan jaringan internet. Masalah yang sering di hadapi seperti akses transportasi dengan kondisi jalan yang curam, berlumpur dan tidak adanya pengaspalan jalan, dan belum maksimalnya evaluasi dari pihak kampus kepada mahasiswa setelah selesainya program Kampus Mengajar. Evaluasi dari Program Kampus Mengajar di STIA Amuntai hanya dilaksanakan sekali yaitu di batch 7, sedangkan pada batch-batch sebelumnya masih belum dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Penyelenggaraan Program Kampus Mengajar pada Prodi Administrasi Publik di STIA Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian terdahulu Erna Surya Sahabuddin (2022) Universitas Negeri Makassar dalam penelitian yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Program Kampus Mengajar terhadap Kapasitas Kinerja Guru dan Mahasiswa.". Berdasarkan hasil penelitian indikator kapasitas kinerja guru dengan kriteria efektivitas sangat efektif. Selanjutnya, dari hasil penelitian indikator kapasitas kinerja mahasiswa dengan kriteria efektivitas sangat efektif. Untuk rekapitulasi data angket kapasitas kinerja guru frekuensi tertinggi sebanyak 120 dengan persentase tertinggi termasuk kriteria efektif. Sedangkan, untuk rekapitulasi data angket kapasitas kinerja mahasiswa frekuensi tertinggi sebanyak 121 dengan persentase tertinggi dalam kriteria sangat efektif. Sehingga pada pelaksanaan program kampus mengajar dapat dikatakan efektif karena menunjukkan perkembangan kapasitas kinerja guru dan mahasiswa. Dan Andi Sarimai (2022) Universitas Muhamadiyah Makassar dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Di Universitas Muhammadiyah Makassar". Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi MBKM di Universitas Makassar telah terlaksana dengan baik dimana para aktor, daya dukung, bidang kebijakan, metode koordinasi, perubahan dalam sistem operasi serta tingkat perubahan yang diinginkan telah tercapai dengan baik.

Implementasi yang ideal memerlukan keseimbangan dari keempat faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sehingga kebijakan dapat diterjemahkan secara efektif menjadi tindakan nyata dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Edwards, 2017). Selain itu, tujuan dari Program Kampus Mengajar adalah untuk memberdayakan mahasiswa dalam membantu proses pengajaran di sekolah, khususnya di daerah terpencil, sambil mengembangkan empati sosial, keterampilan kepemimpinan, dan pengalaman belajar praktis. Program ini juga bertujuan meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, mendukung adaptasi teknologi, serta mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja dengan membangun karakter dan keterampilan lintas disiplin.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, Tipe Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. menyebutkan Penelitian deskriptif merupakan Penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala yang ada pada saat Penelitian dilakukan (Arikunto dalam Zellatifanny dan Mudjiyanto 2018). Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data (Herdiansyah, 2015). Dengan menggunakan *purposive sampling*, peneliti memilih 12 informan untuk dijadikan sebagai sumber data peneliti. Metode untuk memilih sumber data dengan tujuan tertentu disebut dengan *purposive sampling* (Sugiyono, 2016). Dengan menggunakan teori pengukuran implementasi menurut Edwards (2017), transmisi, konsistensi, dan sasaran, sumber daya manusia/petugas, dan fasilitas, komitmen, dukungan, dan wewenang, koordinasi dan prosedur rekrutmen. Pengumpulan data, reduksi data, *display* data, serta membuat kesimpulan, dan memverifikasinya adalah beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh (Miles, Huberman dan Herdiansyah, 2014). Uji Kredibilitas penelitian diperiksa dengan menggunakan meningkatkan ketekunan, triangulasi, bahan referensi, dan melakukan *member check* (Sugiyono, 2014).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Melalui Program Kampus Mengajar pada Prodi Administrasi Publik di STIA Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan teori yang digunakan dalam Implementasi Penyelenggaraan Program MBKM Melalui Program Kampus Mengajar Pada Prodi Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh George C. Edward III (2017:136) menyatakan bahwa untuk mengukur implementasi penyelenggaraan suatu program dapat dilakukan berbagai variable dengan di dukung dengan indikator yang sudah peneliti rangkum sebelumnya menggunakan Teori Edward dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

Komunikasi

Pentingnya komunikasi yang baik dalam menyampaikan kebijakan dari pembuat keputusan ke pelaksana. Jika komunikasi tidak berjalan lancar, tujuan kebijakan tidak akan tercapai karena pelaksana tidak memahami dengan baik apa yang harus mereka lakukan.

a. Transmisi

Transmisi merujuk pada proses penyampaian informasi atau komunikasi yang tepat dan efektif dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan. Transmisi informasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang transmisi penyampaian informasi Program Kampus Mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai terlaksana dengan baik melalui berbagai saluran, seperti media sosial, WhatsApp, email, serta sosialisasi daring dan luring. Dukungan dari tim pusat dan kampus memastikan informasi cepat dan jelas diterima mahasiswa, yang mayoritas merasa puas dengan metode ini. Dokumentasi visual di media sosial turut menguatkan implementasi penyampaian informasi yang membuat ketertarikan dan minat mahasiswa dalam kegiatan Program Kampus Mengajar yang pada akhirnya membuat pendaftar Program selalu naik di setiap batchnya...

b. Konsistensi

Konsistensi merupakan keselarasan dan kesinambungan dalam penyampaian informasi serta penerapan kebijakan di berbagai tingkatan pelaksanaannya. Konsistensi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan berjalan sesuai dengan tujuan awal tanpa adanya penyimpangan atau perbedaan interpretasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tentang konsistensi terhadap penyampaian informasi Program Kampus Mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai cukup konsisten, terbukti dari meningkatnya minat dan pendaftaran mahasiswa di berbagai batch. Namun, evaluasi program belum maksimal dilakukan, hanya diterapkan pada batch 6 dan 7. Hal ini menunjukkan kurang konsistennya dalam aspek evaluasi meskipun sosialisasi program telah rutin dilaksanakan.

c. Sasaran

Sasaran merujuk pada kelompok, individu, atau institusi yang menjadi target dari kebijakan yang diterapkan. Sasaran kebijakan ini adalah pihak yang diharapkan akan menerima dampak langsung dari kebijakan tersebut, dan hasil kebijakan akan diukur berdasarkan perubahan atau manfaat yang terjadi pada sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tentang sasaran terhadap Program Kampus Mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dinilai kurang tepat sasaran karena mahasiswa dari jurusan Administrasi Publik dianggap tidak sesuai untuk tugas mengajar di sekolah. Ketidaksesuaian antara latar belakang akademik mahasiswa dan kebutuhan sekolah mitra mengurangi efektivitas program, meskipun tujuan utamanya adalah meningkatkan keterampilan pendampingan dan adaptasi teknologi. Penugasan lintas jurusan yang diizinkan Kementerian dianggap tidak sepenuhnya mendukung tercapainya sasaran program.

2. Sumber Daya

Keberhasilan kebijakan sangat tergantung pada sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya manusia, keuangan, informasi, dan wewenang. Dalam penelitian ini yaitu tentang implementasi penyelenggaraan program kampus mengajar, sumber daya yang dimaksud bisa meliputi jumlah mahasiswa yang mengikuti program, ketersediaan dosen pembimbing, serta fasilitas penunjang seperti akses internet dan infrastruktur.

a. Sumber Daya Manusia/Petugas

Sumber daya manusia merujuk pada tenaga kerja atau individu-individu yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sumber daya manusia ini mencakup semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang sumber daya manusia/petugas terhadap sumber daya manusia di STIA Amuntai, termasuk dosen pembimbing dan guru pamong, dinilai memadai dan berkualitas dalam mendukung Program Kampus Mengajar. Kompetensi dosen, dukungan koordinator program, serta pengarahan yang disediakan kampus memastikan pembimbingan berjalan efektif, mendukung keberhasilan program di sekolah mitra.

b. Fasilitas

Fasilitas merujuk pada semua sarana fisik dan material yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. Fasilitas ini termasuk peralatan, infrastruktur,

teknologi, dan sumber daya material lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang fasilitas yang disediakan STIA Amuntai, seperti laptop, akses internet, dan bantuan pendaftaran, dinilai memadai untuk mendukung Program Kampus Mengajar. Namun, keterbatasan infrastruktur di lokasi penugasan, seperti transportasi sulit, jarak jauh, dan minimnya jaringan internet, masih peneliti nilai kurang baik karena hal tersebut menjadi kendala utama bagi mahasiswa di daerah terpencil, menghambat kelancaran program di beberapa sekolah mitra.

3. Disposisi

Sikap atau disposisi dari pelaksana kebijakan juga sangat penting. Jika pelaksana tidak memiliki komitmen atau tidak mendukung kebijakan, maka kebijakan sulit diimplementasikan secara efektif. Di sini, disposisi dari dosen, mahasiswa, dan pihak kampus dalam mendukung keberhasilan program Kampus Mengajar bisa sangat berpengaruh terhadap suksesnya implementasi penyelenggaraan dari program.

a. Komitmen

Komitmen merujuk pada dedikasi, tekad, dan sikap positif dari para pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Komitmen ini sangat penting karena sikap dan keseriusan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan akan sangat memengaruhi keberhasilan implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokuimentasi tentang komitmen terhadap program Program Kampus Mengajar dari kampus STIA Amuntai menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pelaksanaan Program Kampus Mengajar melalui penyediaan fasilitas, pembimbingan, dan pengawasan.

b. Dukungan

Dukungan merujuk pada salah satu aspek penting dari faktor disposisi, yaitu sikap pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Dukungan ini mengacu pada bagaimana komitmen dan sikap pelaksana kebijakan mendukung atau menolak kebijakan tersebut. Sikap positif atau dukungan yang kuat dari pelaksana kebijakan sangat penting karena mereka adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maka peneliti dapat simpulkan bahwa dukungan dari Kampus STIA Amuntai sangat baik kepada mahasiswa dalam Program Kampus Mengajar melalui apresiasi, fasilitas, pembekalan, dan motivasi. Dukungan ini meningkatkan semangat mahasiswa dalam menjalankan segala macam program di setiap sekolah penugasan.

c. Wewenang

Wewenang merujuk pada salah satu elemen penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Wewenang di sini mengacu pada otoritas formal yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan untuk menjalankan dan menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Wewenang ini memberikan legitimasi bagi pelaksana untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tentang wewenang kampus STIA Amuntai memberikan wewenang yang memadai kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk mengawasi Program Kampus Mengajar melalui

kunjungan langsung dan laporan mingguan. Mahasiswa juga diberi kebebasan menjalankan program kerja sesuai keahlian mereka di bawah pengawasan DPL, mendukung pelaksanaan program secara efektif dan sesuai standar kampus.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang rumit bisa menjadi hambatan bagi implementasi kebijakan. Program yang efektif memerlukan struktur birokrasi yang mendukung kerjasama lintas departemen. Untuk MBKM, disini peneliti ingin mengetahui apakah ada koordinasi dan prosedur rekrutmen yang baik antara pihak kampus dengan Kemendikbudristek serta mitra sekolah yang menerima mahasiswa dalam implementasi penyelenggaraan program kampus mengajar.

a. Koordinasi

Koordinasi merupakan bagian dari faktor struktur birokrasi, yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Koordinasi merujuk pada bagaimana berbagai unit atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan saling bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tentang koordinasi program Kampus Mengajar peneliti dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan Program Kampus Mengajar di STIA Amuntai berjalan cukup baik dan efektif, didukung oleh kerja sama terstruktur antara kampus, Dinas Pendidikan, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan sekolah. Komunikasi antara kampus dan Dinas Pendidikan membantu pengaturan penempatan mahasiswa di sekolah-sekolah, sementara DPL menjaga kelancaran kegiatan program melalui komunikasi aktif dengan mahasiswa dan guru pamong.

b. Prosedur Rekrutmen

Dalam konteks struktur birokrasi, prosedur rekrutmen merujuk pada mekanisme, tahapan, dan kriteria yang ditetapkan untuk menarik, menyeleksi, dan menempatkan individu ke dalam posisi tertentu dalam organisasi birokrasi. Prosedur ini sangat penting karena memengaruhi kualitas tenaga kerja birokrasi yang nantinya akan menjalankan kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tentang prosedur rekrutmen Kampus Mengajar di STIA Amuntai telah sesuai standar Kemendikbud, meliputi sosialisasi, pendaftaran, seleksi, tes, dan penetapan lokasi. Antusiasme mahasiswa dan dukungan kampus mendukung keberhasilan rekrutmen.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Melalui Program Kampus Mengajar Pada Prodi Administrasi Publik di STIA Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam suatu pelaksanaan kebijakan publik itu pasti ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan publik maupun program itu sendiri, terutama dalam Implementasi Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Melalui Program Kampus Mengajar Pada Prodi Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

Berikut Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Melalui Program Kampus Mengajar Pada Prodi Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara:

1. Faktor Pendorong

Dalam sebuah penelitian tentunya ada hal-hal yang mendorong atau mendukung dari hasil penelitian. Berikut ini faktor pendorong keberhasilan Implementasi Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Melalui Program Kampus Mengajar Pada Prodi Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara di antaranya:

a. Adanya Dukungan Penuh dari Pihak Kampus

Pihak STIA Amuntai memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa yang mengikuti Program Kampus Mengajar. Bentuk dukungan ini mencakup pembekalan sebelum pelaksanaan program dan pemantauan oleh dosen pembimbing lapangan (DPL). Kampus juga memfasilitasi komunikasi yang baik antara pihak kampus, mahasiswa, dan sekolah mitra, sehingga program berjalan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang adanya dukungan penuh dari pihak kampus melalui pembekalan, bimbingan, dan penyediaan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang memantau dan mendukung mahasiswa.

b. Fleksibilitas Program MBKM melalui Program Kampus Mengajar

Kebijakan MBKM melaului Program Kampus Mengajar yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar di luar prodi atau kampus selama beberapa semester memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan praktis. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk bereksperimen dengan pengalaman nyata tanpa mengganggu studi utama mereka.

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi tentang fleksibiltas program kampus mengajar dapat disimpulkan bahwa hal tersebut menjadi faktor utama keberhasilan Program Kampus Mengajar di Prodi Administrasi Publik STIA Amuntai. Kebijakan ini memungkinkan mahasiswa belajar di luar program studi utama dan kampus, memberikan mereka pengalaman praktis yang relevan dengan dunia kerja.

c. Kesempatan Mengasah Soft Skills

Program Kampus Mengajar memberikan mahasiswa kesempatan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan adaptasi dalam lingkungan yang beragam. *Soft skills* ini penting untuk menyiapkan mahasiswa menjadi individu yang kompeten di dunia kerja dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang kesempatan mengasah *soft skills* dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Program Kampus Mengajar pada Prodi Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan *soft skills* seperti komunikasi, kepemimpinan, dan adaptasi. Program ini juga meningkatkan empati, keterampilan pemecahan masalah, serta kepercayaan diri, sehingga mempersiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang kompeten secara profesional dan sosial.

2. Faktor Penghambat

Dalam prosesnya ada beberapa faktor yang mampu menghambat implementasi sebuah program. Berikut ini faktor penghambat Implementasi Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Melalui Program Kampus Mengajar Pada Prodi

Utara di antaranya:

a. Kebijakan Kemendikbudristek yang memperbolehkan semua jurusan untuk ikut Program Kampus Mengajar

Kebijakan ini memungkinkan mahasiswa dari berbagai latar belakang pendidikan untuk berpartisipasi tanpa mempertimbangkan apakah kompetensi akademik mereka sesuai dengan kebutuhan pengajaran di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi Kebijakan Kemendikbudristek yang memperbolehkan semua jurusan untuk ikut Program Kampus Mengajar salah satu faktor penghambat Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Program Kampus Mengajar pada Prodi Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai adalah kebijakan yang memperbolehkan semua jurusan ikut serta. Kebijakan ini sering menyebabkan ketidaksesuaian antara bidang studi mahasiswa dengan kebutuhan pengajaran di sekolah, sehingga mahasiswa, khususnya dari latar belakang administrasi publik, mengalami kesulitan saat mengajar mata pelajaran seperti matematika atau sains. Hal ini menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program.

b. Kebijakan Kemendikbudristek yang menempatkan penugasan ke tempat terpencil

Kebijakan Penempatan mahasiswa ke daerah terpencil oleh Kemendikbudristek bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Namun, kebijakan ini dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program karena tantangan yang dihadapi di lapangan. Program Kampus Mengajar yang dilaksanakan di daerah terpencil sering terkendala oleh buruknya infrastruktur.

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi tentang Kebijakan Kemendikbudristek yang menempatkan penugasan ke tempat terpencil adalah salah satu faktor penghambat Implementasi Program MBKM melalui Program Kampus Mengajar pada Prodi Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Hal ini disebabkan oleh buruknya infrastruktur, akses jalan yang sulit, dan jarak yang jauh ke lokasi penugasan. Selain itu, keterbatasan jaringan internet menghambat persiapan materi dan komunikasi yang efektif antara mahasiswa, kampus, dan rekan pengajar lainnya.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan penelitian tentang Implementasi Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Melalui Program Kampus Mengajar pada Prodi Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari indikator: *Pertama*, pada indikator transmisi sudah berjalan baik, hal tersebut dikarenakan Sosialisasi program dilakukan secara efektif melalui media sosial dan platform daring seperti Google Meet dan Zoom. *Kedua*, pada indikator sumber daya manusia atau petugas sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan tersedianya koordinator, dosen, dan mahasiswa yang mendukung pelaksanaan program. *Ketiga*, pada indikator komitmen sudah berjalan dengan baik pula, karena Kampus memberikan pelayanan maksimal kepada mahasiswa selama proses program. *Keempat*, pada indikator dukungan dari kampus diketahui sudah berjalan dengan baik, karena mahasiswa mendapatkan dukungan moral dan motivasi dari kampus. *Kelima*, pada indikator wewenang sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari mahasiswa diberi wewenang penuh untuk menjalankan program dengan pengawasan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). *Keenam*, pada indikator koordinasi antar instansi seperti dari Kampus, Dinas Pendidikan, maupun kepada Pihak Sekolah sudah berkoordinasi dengan baik dalam menjalankan program kampus mengajar, hal tersebut dalam terlihat dari kolaborasi

ISSN : 2685-8541 Vol. 6, No. 2, 2025

DOI:10.36658/aliidarabalad

antara kampus, Dinas Pendidikan, dan sekolah berjalan baik, terlihat dari observasi dan audiensi yang rutin dilakukan. Ketujuh, pada indikator prosedur rekrutmen pada program kampus mengajar tentang rekrutmen mahasiswa maupun dosen pembimbing lapangan juga sudah baik dan sesuai dengan mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan aturan pusat. Selain 7 indikator yang sudah berjalan dengan baik, peneliti juga menemukan beberapa indikator yang masih belum berjalan dengan baik dalam implementasi program ini yaitu dari indikator: Pertama, pada indikator konsistensi belum berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan kurang konsistennya evaluasi yang diadakan oleh pihak kampus yang mana evaluasi program kampus mengajar dilakukan hanya pada batch 6 dan 7. Kedua, pada indikator sasaran diketahui masih kurang tepat sasaran karena melihat kurangnya kesiapan mahasiswa dalam menghadapi berbagai kemungkinan terutama ketika ditugaskan mengajar dikelas saat melakukan penugasan. Ketiga, pada indikator fasilitas pada beberapa tempat penugasan atau sekolah diketahui juga masih kurang baik, seperti masih buruknya infrastruktur jalan menuju tempat penugasan, jarak penugasan yang jauh dari tempat tinggal mahasiswa dan DPL, hingga terbatasnya akses internet dalam menjalankan program berbasis teknologi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terbagi menjadi dua yaitu faktor penghambat yang meliputi: Pertama, kebijakan Kemendikbudristek yang memperbolehkan semua jurusan ikut program kampus mengajar ini memungkinkan mahasiswa dari berbagai latar belakang pendidikan untuk berpartisipasi tanpa mempertimbangkan apakah kompetensi akademik mereka sesuai dengan kebutuhan pengajaran di sekolah. Kedua, kebijakan penempatan mahasiswa ke daerah terpencil oleh Kemendikbudristek bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Sedangkan faktor pendorong meliputi: Pertama, STIA Amuntai memberikan dukungan signifikan kepada mahasiswa, termasuk pembekalan, pelatihan, dan pengawasan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Kampus juga memfasilitasi komunikasi dengan pihak sekolah mitra, sehingga program dapat berjalan dengan lebih baik. Kedua, Kebijakan MBKM melaului Program Kampus Mengajar yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar di luar prodi atau kampus selama beberapa semester memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan praktis. Ketiga, Program Kampus Mengajar memberikan mahasiswa kesempatan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan adaptasi dalam lingkungan yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2017). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EEFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.

Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BATU MERAH KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION

Vol. 6, No. 2, 2025 DOI:10.36658/aliidarabalad

ISSN: 2685-8541

SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'IYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.

Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.

Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.

Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NON FISIK DI DESA PALIAT KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(11), pp. 4918–4922.

Herdiansyah, H. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Herdiansyah, H. (2015). Panduan Praktis Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.

Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika

Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.

Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Buku Panduan Kampus Mengajar Angkatan 7 Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). *Panduan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan.* Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Muchtar, A. A., Wahyudin, Y., Niarrofah N., & Muthiah, S. (2023). *Efektivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi Mahasiswa Program Kampus Mengajar*. Jurnal Pendidikan, 4(3), 249-251.

Prabawati, V. & Juwita, M., N. (2024). *Efektivitas Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Mewujudkan Sdm Unggul (Studi Pada Universitas Bandar Lampung)*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, 3 (3), 1-5.

Sahabuddin, E. S. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Program Kampus Mengajar terhadap Kapasitas Kinerja Guru dan Mahasiswa*. Skripsi. Universitas Negeri Makassar, Program Studi Administrasi Publik.

Vol. 6, No. 2, 2025

ISSN: 2685-8541

DOI:10.36658/aliidarabalad

Sari, N., S., Amrah, & Sahabuddin, S., E. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Kampus Mengajar Terhadap Kapasitas Kinerja Guru Dan Mahasiswa di SD Inpres Sugitangnga Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Nubin Smart Journal, 1(4), 1-15.

Sarimai, A. (2022). *Implementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Makassar*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.

Zellatifanny, R., & Mudjiyanto, B. (2018). *Dasar-Dasar Penelitian Sosial dan Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.